



LAPORAN KINERJA (LKj) BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. PLAMBOYAN SIBOGAT TELP. (0623) 41243
KISARAN**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaannirrohiim

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan Tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan. Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan

capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan system administrasi Negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran dan pelaksana di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Kisaran, Februari 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN**



Drs. SORIMUDA SIREGAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 4960513 199402 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	7
E. Sistematika.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis.....	9
B. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran	47
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	50
BAB IV PENUTUP.....	59
LAMPIRAN	62
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	61
MATRIKS RENSTRA.....	63
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	66
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tatanan pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 yang dimaksud untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan dan ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Asahan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dan sebagai pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Penagihan Pajak Daerah dan sebahagian UPTD membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan mempunyai tugas pokok dan fungsi:

TUGAS POKOK

- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah serta melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi Daerah.

FUNGSI

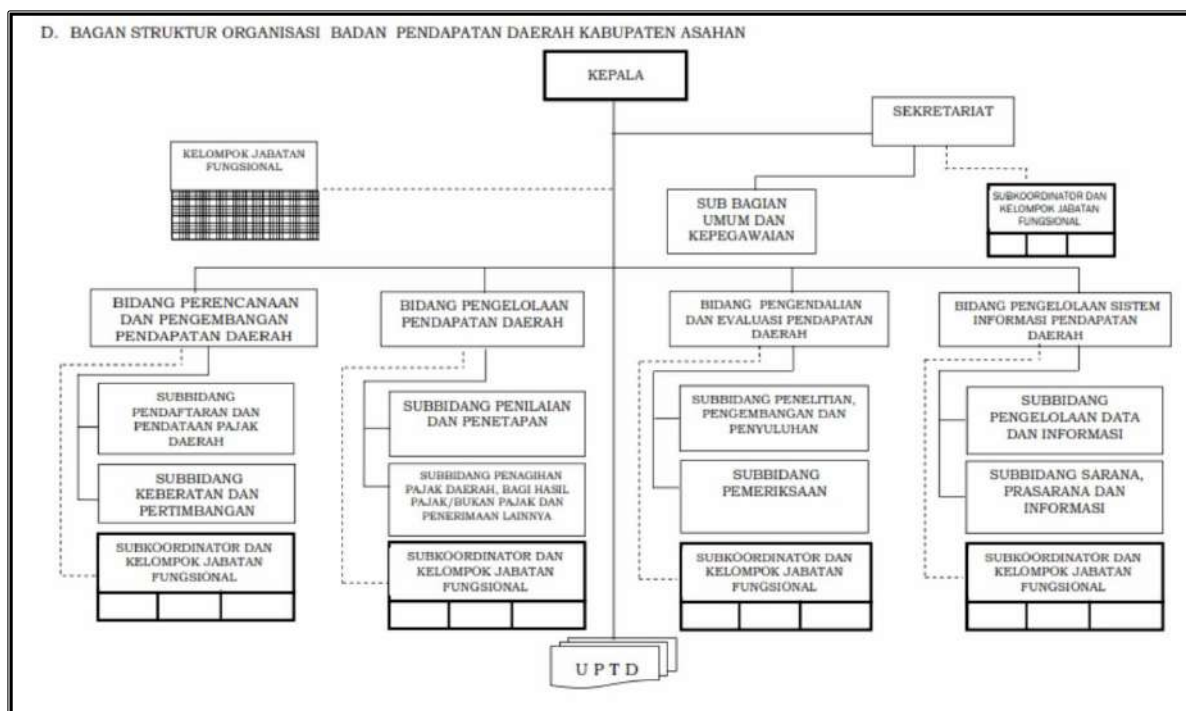
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- Mengkoordinasikan penyusunan rencana umum dan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan penetapan objek pajak serta objek lainnya yang berkaitan dengan peraturan daerah;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan pelaporan seluruh penerimaan pendapatan daerah;
- Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, hukum, kehumasan dan penyusunan program / perencanaan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Badan sebagai pimpinan yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/ Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.

Gambar 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat daerah dimasa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana yang tertuang pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Masih perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dalam pelayanan dan pengelolaan penerimaan pajak daerah;
2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk penunjang sistem perpajakan berbasis aplikasi;
3. Belum sempurnanya regulasi terkait perpajakan daerah serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan guna optimalisasi penerimaan pajak daerah;
4. Masih kurangnya kesadaran dan kemauan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak untuk menunjang pembangunan daerah;

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk penunjang sistem perpajakan berbasis aplikasi;
2. Belum sempurnanya regulasi terkait perpajakan daerah serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan guna optimalisasi penerimaan pajak daerah;
3. Masih kurangnya kesadaran dan kemauan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak untuk menunjang pembangunan daerah;

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan ini disusun berdasarkan beberapa ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Asahan Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2023 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan Setelah Reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraannya Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholder pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dimuat program dan kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Asahan.

Visi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 adalah :

“Masyarakat Asahan Sejahtera Yang Religius dan Berkarakter”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, profesional dan akuntabel;
2. Meningkatkan kerjasama antar pelaku usaha dan pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam rangka mendorong perekonomian daerah;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kemandirian ekonomi;
4. Menciptakan iklim yang kondusif dan kemudahan investasi bagi pengembangan usaha dalam menciptakan lapangan kerja;
5. Meningkatkan akurasi proses perencanaan, penganggaran dan pengelolaan APBD yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam memelihara kesehatan;
7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan daya dukung generasi muda yang melek teknologi dan budaya literasi tinggi;
8. Mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
9. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang berorientasi mendukung produktivitas dan pengembangan kawasan strategis;
10. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, berkelanjutan dan bernilai ekonomis;

11. Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang demokratis, rukun dan gotong royong; dan
12. Meningkatkan perlindungan dan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan yang berbasis pada kompetensi sumber daya manusia;

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah mengacu pada Misi ke-5 yaitu **Meningkatkan akurasi proses perencanaan, penganggaran dan pengelolaan APBD yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.**

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasari pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 sebanyak 2 tujuan dan 3 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut

indikator dan target Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				202 2	202 3	202 4	202 5	202 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah	Meningkatnya kualitas proses analisis, penyusunan dan pengelolaan APBD	Opini BPK (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah	Pertumbuhan pendapatan daerah (Persen)	5	5	5	5	5
2	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan (Persen)	100	100	100	100	100

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan

dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATU AN	PENJELASAN		
					DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas proses analisis, penyusunan dan pengelolaan APBD	1.1	Opini BPK	Opini	Pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan	{Jumlah temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti / Total Temuan BPK dan Inspektorat} x 100%	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah	2.1	Pertumbuhan pendapatan daerah	Perse n	Pertumbuhan pendapatan yang diperoleh dari penerimaan dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan	{Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun (n) – Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun (n-1) / Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun (n-1) } x 100%	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
3	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	3.1	Tingkat layanan publik urusan pemerintahan	Perse n	Tingkat capaian realisasi anggaran pada instansi pemerintah	{Jumlah Realisasi Pagu Anggaran / Total Pagu Anggaran} x 100%	Bidang Sekretariat

B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023.

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2023
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah	Meningkatnya kualitas proses analisis, penyusunan dan pengelolaan APBD	Opini BPK	Opini	WTP
		Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah	Pertumbuhan pendapatan daerah	Persen	5
2	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan	Persen	100

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja sebagai tekat dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan

prespektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan perjanjian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 10 bulan januari tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
Tahun 2023

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas proses analisis, penyusunan dan pengelolaan APBD	Opini BPK	Opini	WTP
2	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah	Pertumbuhan pendapatan daerah	Persen	5
3	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan	Persen	100

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah:

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	43.303.475,00;
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	2 Dokumen	43.303.475,00;
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	85,00%	81,65%	1.846.400.800,00
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	32.499.925,00;
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	2 Peraturan	5 Peraturan	444.999.900,00;
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	93.499.900,00;
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	1 Unit	36.315.525,00;
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00;
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB.P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	228.000 Obyek Pajak	225.257 Obyek Pajak	157.738.400,00;
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	228.000 Dokumen	225.257 Dokumen	134.992.650,00;
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	650 Layanan	1.263 Layanan	64.832.875,00;
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	3.500 Dokumen	2.200 Dokumen	59.999.825,00;

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
	Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	439.999.925,00;
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	175 Dokumen	35 Dokumen	51.465.950,00;
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	3.500 Dokumen	2.190 Dokumen	49.931.125,00;
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	40.120.100,00;

Perjanjian kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 01 bulan nopember tahun 2023 dilaksanakan perubahan perjanjian tahun 2023 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
Tahun 2023

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas proses analisis, penyusunan dan	Opini BPK	Opini	WTP

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	pengelolaan APBD			
2	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah	Pertumbuhan pendapatan daerah	Persen	5
3	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan	Persen	100

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perubahan Program dan Kegiatan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	43.303.475,00;
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	2 Dokumen	43.303.475,00;
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	85,00%	81,65%	1.666.396.100,00;
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	32.499.925,00;
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	2 Peraturan	5 Peraturan	559.999.900,00;
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	93.499.900,00;
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	1 Unit	36.315.525,00;
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00;
	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	14.999.800,00;
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan	228.000 Obyek Pajak	225.257 Obyek Pajak	157.738.400,00;

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
	Perkotaan (PBB.P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	228.000 Dokumen	225.257 Dokumen	134.992.650,00;
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	650 Layanan	1.263 Layanan	64.832.875,00;
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	3.500 Dokumen	2.200 Dokumen	59.999.825,00;
	Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	490.004.825,00;
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	175 Dokumen	35 Dokumen	51.465.950,00;
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	3.500 Dokumen	2.190 Dokumen	49.931.125,00;
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	40.120.100,00;

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapenda Kab. Asahan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Asahan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/ sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/ sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/ sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Bapenda Kab. Asahan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Bapenda Kab. Asahan Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda Kab. Asahan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai

ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Bapenda Kab. Asahan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda Kab. Asahan Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pendapatan Daerah Kab. Asahan Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan dan Pengelolaan APBD	Opini BPK (Opini)	WTP	WTP*	100,00;	Sangat Tinggi	Bidang P2D;
2	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah;	Pertumbuhan Pendapatan Daerah (Persen)	5,00	6,70	134,00	Sangat Tinggi	Bidang P3D; Bidang P2D;
3	Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah	Tingkat Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan (Persen)	100,00	84,69	84,69	Tinggi	Bidang Sekretariat

Uraian penjelasan tabel:

Sasaran 1 :

Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan dan Pengelolaan APBD;

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standard akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas sistem pengendalian intern;

Cara Pengukuran Indikator :

Opini BPK (Opini);

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah Temuan BPK dan Inspektorat yang Ditindaklanjuti}}{\text{Total Temuan BPK dan Inspektorat}} \times 100\%$$

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah yaitu :

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
3. Opini Tidak Wajar; dan

4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer of Opinion*)

Hasil perhitungan dari capaian target **Indikator Kinerja Opini BPK (Opini)** yang ditargetkan sebesar WTP dan realisasi adalah WTP dengan capaian persentase sebesar 100,00%.

Adapun **Tercapainya** target indikator kinerja pada tahun 2023 diatas, disebabkan telah maksimalnya tindaklanjut dari temuan BPK dan Inspektorat Kabupaten Asahan untuk diselesaikan atau ditindaklanjuti pada tahun 2023.

Sasaran 2 :

Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah;

Cara Pengukuran Indikator :

Pertumbuhan Pendapatan Daerah (Persen);

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun } (n) - \text{Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun } (n-1)}{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun } (n-1)} \times 100\%$$

Untuk anggaran Tahun 2023, DPRD Kabupaten Asahan dan Pemerintah Kabupaten Asahan telah menetapkan target Pendapatan pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 1.790.178.753.298,00; dengan realisasi sebesar Rp. 1.787.731.729.065,98; atau 99,86%. Dengan komposisi Pendapatan APBD tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 184.239.386.206,00; dengan realisasi sebesar Rp. 169.216.958.882,98; atau 91,85%, Pendapatan Transfer/ Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.575.975.063.795,00; dengan realisasi sebesar Rp. 1.595.037.290.916,00; atau 101,21% dan Jumlah Lain-Lain

Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 29.964.303.297,00; terealisasi sebesar Rp. 23.477.479.267,00; atau 78,35%.

Perbandingan komposisi di atas dapat dilihat bahwa Dana Transfer/ Dana Perimbangan mempunyai porsi yang cukup besar yaitu hampir mencapai 89% yang sebagian besarnya merupakan Dana DAU dan DAK, sedang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 10% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu sebesar 1%.

Grafik 3.1

Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Tahun 2023



Hasil perhitungan dari capaian target **Indikator Kinerja Pertumbuhan Pendapatan Daerah (Persen)** yang ditargetkan sebesar 5% dan realisasi adalah sebesar 6,70% dengan capaian persentase sebesar 134%. Jumlah realisasi pendapatan daerah tahun 2023 sebesar Rp. 1.787.731.729.065,98; dan jumlah realisasi pendapatan daerah tahun 2022 sebesar Rp. 1.675.529.388.615,69; atau realisasi persentase

pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 6,70% atau kenaikan pendapatan sebesar Rp. 112.202.340.450,29;

Adapun **Tercapainya** target dari **Indikator Kinerja Pertumbuhan Pendapatan Daerah (Persen)** diatas, disebabkan telah maksimalnya realisasi peningkatan Pendapatan Daerah Tahun 2023 bila dibandingkan tahun sebelumnya. Upaya yang dilakukan adalah menindaklanjuti Peraturan Bupati Asahan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online, dan tindaklanjut dari Pelaksanaan Keputusan Bupati Asahan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Asahan guna percepatan transaksi tunai menjadi non tunai khususnya untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Asahan;

Sasaran 3 :

Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Adapun dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan suatu daerah, dukungan anggaran berperan penting dalam mensukseskan keberhasilan visi dan misi yang telah direncanakan oleh daerah.

Dalam hal ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan telah mendapatkan pagu anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp. 19.477.584.630,00; (*Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*) dengan Realisasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.

16.495.304.663,00; (*Enam Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*) atau persentase sebesar 84,69% dari pagu anggaran.

Perbandingan pagu anggaran yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan pada tahun 2023 mengalami **peningkatan** dibandingkan pada tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya kenaikan pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

Pagu anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 sebesar Rp. 19.477.584.630,00; (*Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*), selanjutnya dialokasikan untuk mendanai 3 (tiga) program yang tertuang dalam 10 (sepuluh) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan.

Cara Pengukuran Indikator :

Prosentase Tingkat Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan;

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Pagu Anggaran}}{\text{Total Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan dari capaian target **Indikator Kinerja Tingkat Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan (Persen)** yang ditargetkan sebesar 100,00% dan realisasi adalah 84,69% dengan capaian persentase sebesar 84,69% yaitu jumlah realisasi pagu tahun 2023 sebesar Rp. 16.495.304.663,00; dan jumlah total pagu tahun 2023 sebesar Rp. 19.477.584.630,00; atau realisasi sebesar 84,69%.

Adapun **Belum Tercapainya** target dari **Indikator Kinerja Tingkat Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan (Persen)** diatas,

disebabkan ada beberapa insentif pajak daerah yang penyerapan anggaran insentifnya belum terserap secara maksimal dikarenakan ada beberapa peraturan/ regulasi yang belum diakomodir untuk pelaksanaan pembayaran insentif tersebut.

Untuk tindaklanjutnya kedepannya adalah peraturan/ regulasi insentif tersebut akan ditindaklanjuti guna pelaksanaan pembayaran insentif tersebut kedepannya.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelum nya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan dan Pengelolaan APBD	Opini BPK (Opini)	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00
2	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah;	Pertumbuhan Pendapatan Daerah (Persen)	5,00	1,87	37,40	5,00	6,70	134,00
3	Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah	Tingkat Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan (Persen)	100,00	85,41	85,41	100,00	84,69	84,69

Uraian penjelasan tabel:

Sasaran 1 :

Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan dan Pengelolaan APBD;

Hasil perhitungan dari capaian target **Indikator Kinerja Opini BPK (Opini)** yang ditargetkan pada tahun 2023 adalah WTP dan realisasi pada tahun 2023 adalah WTP dengan capaian persentase sebesar 100,00% dan target pada tahun 2022 adalah WTP dan realisasi pada tahun 2022 adalah WTP dengan capaian persentase 100,00%.

Adapun **Tercapainya** target indikator kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2022 diatas, disebabkan telah maksimalnya tindaklanjut dari temuan BPK-RI dan Inspektorat Kabupaten Asahan untuk diselesaikan atau ditindaklanjuti pada tahun 2023 dan tahun 2022.

Sasaran 2 :

Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah;

Hasil perhitungan dari capaian target **Indikator Kinerja Pertumbuhan Pendapatan Daerah (Persen)** yang ditargetkan tahun 2023 sebesar 5% dan realisasi adalah sebesar 6,70% dengan capaian persentase sebesar 134,00% dan yang ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 5% dan realisasi adalah sebesar 1,87 dengan capaian persentase sebesar 37,40%.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 telah berhasil mencapai pertumbuhan pendapatan daerah yaitu sebesar

6,70% atau sebesar Rp. 112.202.340.450,29; lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2022 yaitu sebesar 1,87% atau sebesar Rp. 30.806.095.918,77. Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2023 **Lebih Tinggi** bila dibandingkan realisasi pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2022.

Sasaran 3 :

Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;

Hasil perhitungan dari capaian target **Indikator Kinerja Tingkat Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan (Persen)** yang ditargetkan tahun 2023 sebesar 100,00% dan realisasi adalah sebesar 84,69% dengan capaian persentase sebesar 84,69% dan yang ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 100,00% dan realisasi adalah sebesar 85,41% dengan capaian persentase sebesar 85,41%.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 telah berhasil mencapai tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan daerah yaitu sebesar 84,69% atau sebesar Rp. 16.495.304.663,00; lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan daerah tahun 2022 yaitu sebesar 85,41% atau sebesar Rp. 15.421.907.241,00. Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan daerah pada tahun 2023 **Lebih Tinggi** bila dibandingkan realisasi tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan daerah pada tahun 2022.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Bapenda Kab Asahan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan dan Pengelolaan APBD	Opini BPK (Opini)	WTP	WTP	100,00
2	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah;	Pertumbuhan Pendapatan Daerah (Persen)	6,70	5,00	134,00
3	Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah	Tingkat Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan (Persen)	84,69	100,00	84,69

Uraian penjelasan tabel:

Sasaran 1 :

Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan dan Pengelolaan APBD;

Adapun hasil perhitungan dari capaian target **Indikator Kinerja Opini BPK (Opini)** yang ditargetkan pada tahun 2023 adalah WTP dan realisasi pada tahun 2023 adalah WTP dengan capaian persentase sebesar 100,00% dan target akhir pada tahun 2026 adalah WTP.

Adapun **Tercapainya** target indikator kinerja pada tahun 2023 diatas, disebabkan telah maksimalnya tindaklanjut dari temuan BPK-RI dan Inspektorat Kabupaten Asahan untuk diselesaikan atau ditindaklanjuti pada tahun 2023 dan tingkat kemajuan pada tahun 2026 sebesar 100,00%.

Sasaran 2 :

Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah;

Adapun hasil perhitungan dari capaian target **Indikator Kinerja Pertumbuhan Pendapatan Daerah (Persen)** yang ditargetkan tahun 2023 sebesar 5% dan realisasi adalah sebesar 6,70% dengan capaian persentase sebesar 134,00% dan yang ditargetkan pada akhir tahun 2026 adalah sebesar 5%.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 telah berhasil mencapai pertumbuhan pendapatan daerah yaitu sebesar 6,70% atau sebesar Rp. 112.202.340.450,29; lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2022 yaitu sebesar 1,87% atau sebesar Rp. 30.806.095.918,77; dan tingkat kemajuan pada tahun 2026 adalah sebesar 134,00%.

Sasaran 3 :

Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;

Adapun hasil perhitungan dari capaian target **Indikator Kinerja Tingkat Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan (Persen)** yang

ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 100,00% dan realisasi adalah sebesar 84,69% dengan capaian persentase sebesar 84,69% dan yang ditargetkan pada akhir tahun 2026 adalah sebesar 100,00%.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 telah berhasil mencapai tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan daerah yaitu sebesar 84,69% atau sebesar Rp. 16.495.304.663,00; lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan daerah tahun 2022 yaitu sebesar 85,41% atau sebesar Rp. 15.421.907.241,00 dan tingkat kemajuan pada tahun 2026 adalah sebesar 84,69%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Dengan Standart
Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standart Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan dan Pengelolaan APBD	Opini BPK (Opini)	WTP	--	--
2	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah;	Pertumbuhan Pendapatan Daerah (Persen)	6,70	--	--
3	Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah	Tingkat Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan (Persen)	84,69	--	--

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan Dan Solusi

N o	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan dan Pengelolaan APBD	Opini BPK (Opini)	WTP	WTP*	100,00	Indikator Kinerja Opini BPK yang ditargetkan adalah WTP, pada tahapan ini masih dalam proses audit BPK-RI;	Masih dalam proses audit BPK-RI;
2	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah;	Pertumbuhan Pendapatan Daerah (Persen)	5,00	6,70	134,00	Indikator Kinerja Pertumbuhan Pendapatan Daerah yang ditargetkan sebesar 5% dengan realisasi sebesar 6,70% adalah Tercapai . Disebabkan telah maksimalnya realisasi peningkatan Pendapatan Daerah Tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya;	Solusi nya adalah menindaklanjuti Peraturan Bupati Asahan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah secara Sistem Online, dan tindak lanjut dari Pelaksanaan Keputusan Bupati Asahan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Asahan guna percepatan transaksi tunai menjadi non tunai khususnya untuk Pajak Daerah dan

N o	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
							Retribusi Daerah Kabupaten Asahan;
3	Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah	Tingkat Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan (Persen)	100,00	84,69	84,69	Indikator Kinerja Tingkat Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 84,69% adalah Belum Tercapai . Tidak tercapainya target tersebut, disebabkan ada beberapa insentif pajak daerah yang penyerapan anggaran insentifnya belum terserap secara maksimal, disebabkan ada beberapa peraturan yang belum diakomodir untuk pelaksanaan pembayaran insentif pajak daerah tersebut;	Solusi nya adalah untuk menindaklanjuti peraturan-peraturan tersebut akan segera diakomodir guna pelaksanaan pembayaran insentif pajak daerah tersebut untuk tahun kedepannya;

Uraian penjelasan tabel:

Sasaran 1 :

Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan dan Pengelolaan APBD;

Adapun hasil perhitungan dari capaian target **Indikator Kinerja Opini BPK (Opini)** yang ditargetkan pada tahun 2023 adalah WTP dan realisasi pada tahun 2023 adalah WTP dengan capaian persentase sebesar 100,00%. Indikator Kinerja Opini BPK yang ditargetkan adalah WTP, pada tahapan ini masih dalam proses audit BPK-RI;

Sasaran 2 :

Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah;

Adapun hasil perhitungan dari capaian target **Indikator Kinerja Pertumbuhan Pendapatan Daerah (Persen)** yang ditargetkan tahun 2023 sebesar 5% dan realisasi adalah sebesar 6,70% dengan capaian persentase sebesar 134,00%.

Analisis Keberhasilan/ Kegagalan terhadap target **Indikator Kinerja Pertumbuhan Pendapatan Daerah (Persen)** yang realisasi capaiannya adalah **Tercapai**, disebabkan telah maksimalnya realisasi peningkatan Pendapatan Daerah Tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Solusinya adalah menindaklanjuti Peraturan Bupati Asahan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah secara Sistem Online, dan tindaklanjut dari Pelaksanaan Keputusan Bupati Asahan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Asahan guna percepatan transaksi tunai menjadi non tunai khususnya untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Asahan;

Sasaran 3 :

Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;

Adapun hasil perhitungan dari capaian target **Indikator Kinerja Tingkat Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan (Persen)** yang ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 100,00% dan realisasi adalah sebesar 84,69% dengan capaian persentase sebesar 84,69%.

Analisis Keberhasilan/ Kegagalan terhadap target **Indikator Kinerja Tingkat Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan (Persen)** yang realisasi capaiannya adalah **Belum Tercapai**, tidak tercapainya target tersebut disebabkan ada beberapa insentif pajak daerah yang penyerapan anggaran insentifnya belum terserap secara maksimal, disebabkan ada beberapa peraturan yang belum diakomodir untuk pelaksanaan pembayaran insentif pajak daerah tersebut. Adapun solusinya adalah untuk menindaklanjuti peraturan-peraturan tersebut akan segera diakomodir guna pelaksanaan pembayaran insentif pajak daerah tersebut untuk tahun kedepannya;

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Program Dan Kegiatan

N o	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	%Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Proses	Opini BPK (Opini)	100,00	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Tertib Penyusunan Anggaran Daerah	100,00	Menunjang

N o	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	%Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
	Analisis, Penyusunan dan Pengelolaan APBD						
				<i>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>			
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	100,00	Menunjang
2	Meningkat nya Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Daerah (Persen)	134,00	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat Ketercapaian Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	81,62	Menunjang
				<i>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>			
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	100,00	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	250,00	Menunjang
				Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	100,00	menunjang
				Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	100,00	menunjang
				Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	100,00	Menunjang
				Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan	Jumlah objek pajak yang di sesuaikan NJOP- nya	98,79	Menunjang

N o	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	%Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Bea Perolehan HaK atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)			
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen petetapan pajak daerah	98,79	Menunjang
				Pelayanan Dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	194,30	Menunjang
				Penelitian Dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	62,85	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	100,00	Menunjang
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	20,00	Menunjang
				Pengendalian , Pemeriksaan Dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumentasi pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	62,57	Menunjang
				Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	100,00	Menunjang
3	Meningkat nya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tingkat pelayanan pendukung urusan pemerintahan (persen)	84,69	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran Dan			

N o	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	%Capai an	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	%Cap aian	Menunja ng/Tidak Menunja ng
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100,00	Menunjang
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100,00	menunjang
				<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100,00	Menunjang
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	100,00	Menunjang
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan triwulanan semesteran SKPD	100,00	Menuunjan g
				<i>Administrasi Barang Milik Daerah Dan Perangkat Daerah</i>			
				Rekonsiliasi Dan Laporan Penyusunan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah SKPD	100,00	Menunjang
				<i>Administrasi Kepegawaian</i>			

N o	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	%Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>Perangkat Daerah</i>			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100,00	Menunjang
				Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100,00	Menunjang
				<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100,00	Menunjang
				Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100,00	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	100,00	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah paket cetakan penggandaan yang disediakan	100,00	Menunjang
				Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100,00	Menunjang
				Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	100,00	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100,00	menunjang
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis	100,00	menunjang

N o	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	%Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pada SKPD	elektronik pada SKPD		
				<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			
				Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang di sediakan	100,00	Menunjang
				Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lain nya yang di sediakan	100,00	Menunjang
				<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100,00	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di sediakan	100,00	Menunjang
				Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	100,00	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa laporan umum kantor yang di sediakan	100,00	Menunjang
				<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan di bayarkan pajak	100,00	Menunjang

N o	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	%Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kendaraan Dinas Jabatan			
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	100,00	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	100,00	Menunjang
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	100,00	Menunjang

Uraian penjelasan tabel:

Sasaran 1 :

Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan dan Pengelolaan APBD;

Adapun Tujuan/ Sasaran **Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan dan Pengelolaan APBD** dengan **Indikator Kinerja Opini BPK (Opini)** yaitu persentase capaiannya sebesar **100,00%**, dengan rincian opini BPK yang ditargetkan tahun 2023 sebesar WTP dengan realisasi adalah sebesar WTP.

Adapun Program/ Kegiatan yaitu **Program Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan Indikator Kinerjanya adalah **Tingkat Tertib Penyusunan Anggaran Daerah** yang persentase capaiannya adalah 100,00% dari target sebesar 100,00%. Angka tersebut diperoleh dari realisasi pelaksanaan tingkat tertib penyusunan anggaran daerah pada masing-masing sub kegiatan yang telah dilaksanakan dari target yang

telah ditetapkan. Adapun rata-rata capaian dari masing-masing sub kegiatan adalah 100,00% dan secara keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah menunjang.

Sasaran 2 :

Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah;

Adapun Tujuan/ Sasaran **Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah** dengan **Indikator Kinerja Pertumbuhan Pendapatan Daerah (Persen)** yaitu persentase capaiannya sebesar **134,00%**, dengan rincian pertumbuhan pendapatan daerah yang ditargetkan tahun 2023 sebesar 5,00% dengan realisasi adalah sebesar 6,70%.

Adapun Program/ Kegiatan yaitu **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah** dengan Indikator Kinerjanya adalah **Tingkat Ketercapaian Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah** yang persentase capaiannya adalah sebesar **81,62%** dari target sebesar 100,00%. Angka tersebut diperoleh dari Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 83.447.892.821,00; ditambah dengan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 8.617.985.129,00; dibagi dengan Target Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 93.816.711.376,00; ditambah dengan Target Retribusi Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 18.978.676.790,00. Adapun rata-rata capaian dari masing-masing sub kegiatan adalah 100,00% dan secara keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah menunjang.

Sasaran 3 :

Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;

Adapun Tujuan/ Sasaran **Meningkatnya Koordinasi, Akutabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** dengan **Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Pendukung Urusan Pemerintahan (Persen)** yaitu persentase capaiannya sebesar **84,69%**, dengan rincian pagu belanja pada tahun 2023 sebesar Rp. 19.477.584.630,00; dengan realisasi sebesar Rp. 16.495.304.663,00.

Adapun Program/ Kegiatan yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota** dengan Indikator Kinerjanya adalah **Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** yang persentase capaiannya adalah sebesar **100,00%** dari target sebesar 100,00%. Angka tersebut diperoleh dari realisasi pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan pada masing-masing sub kegiatan yang telah dilaksanakan dari target yang telah ditetapkan. Adapun rata-rata capaian dari masing-masing sub kegiatan adalah 100,00% dan secara keseluruhan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah menunjang.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
	Badan Pendapatan Daerah	19.477.584.630,00;	16.495.304.663,00;	84,69
I	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	43.303.475,00;	37.471.900,00;	86,53
1	<i>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>	43.303.475,00;	37.471.900,00;	86,53
1.1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	43.303.475,00;	37.471.900,00;	86,53
II	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.846.400.800,00;	1.753.030.207,00;	94,94
2	<i>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	1.846.400.800,00;	1.753.030.207,00;	94,94
2.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	32.499.925,00;	31.943.169,00;	98,29
2.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	559.999.900,00;	522.812.250,00;	93,36
2.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	93.499.900,00;	93.280.150,00;	99,76
2.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	36.315.525,00;	35.812.650,00;	98,62
2.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	60.000.000,00;	59.615.700,00;	99,36
2.6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	14.999.800,00;	4.764.430,00;	31,76
2.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	157.738.400,00;	144.028.000,00;	91,31
2.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	134.992.650,00;	133.025.250,00;	98,54
2.9	Pelayanan dan Konsultasi pajak Daerah	64.832.875,00;	64.545.975,00;	99,56
2.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	59.999.825,00;	57.643.825,00;	96,07
2.11	Penagihan Pajak Daerah	490.004.825,00;	470.708.133,00;	96,06
2.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	51.465.950,00;	50.987.350,00;	99,07
2.13	Pengendalian, pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	49.931.125,00;	49.051.125,00;	98,24
2.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	40.120.100,00;	34.812.200,00;	86,77
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	17.587.880.355,00;	14.704.802.556,00;	83,61
3	<i>Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	45.000.025,00;	44.466.025,00;	98,81
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.075,00;	19.892.675,00;	99,46
3.2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.999.950,00;	24.573.350,00;	98,29
4	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	13.404.725.280,00;	10.636.984.644,00;	79,35

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
4.1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	13.369.725.605,00;	10.602.034.969,00;	79,30
4.2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.999.825,00;	19.974.825,00;	99,87
4.3	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.999.850,00;	14.974.850,00;	99,83
5	<i>Administrasi Barang Milik Daerah Dan Perangkat Daerah</i>	<i>25.249.800,00;</i>	<i>25.249.800,00;</i>	<i>100,00</i>
5.1	Rekonsiliasi Dan Laporan Penyusunan Barang Milik Daerah Pada SKPD	25.249.800,00;	25.249.800,00;	100,00
6	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>219.199.850,00;</i>	<i>200.729.850,00;</i>	<i>91,57</i>
6.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	43.200.000,00;	31.950.000,00;	73,96
6.2	Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	175.999.850,00;	168.779.850,00;	95,90
7	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>2.204.078.350,00;</i>	<i>2.185.660.887,00;</i>	<i>99,16</i>
7.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	24.993.750,00;	24.993.750,00;	100,00
7.2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	507.999.775,00;	507.999.775,00;	100,00
7.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.999.325,00;	29.869.325,00;	99,57
7.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	871.910.000,00;	871.684.125,00;	99,97
7.5	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	11.016.000,00;	10.980.000,00;	99,67
7.6	Penyediaan Bahan/ Material	9.820.000,00;	9.820.000,00;	100,00
7.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	118.000.000,00;	117.974.412,00;	99,98
7.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	630.339.500,00;	612.339.500,00;	97,14
8	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>458.897.600,00;</i>	<i>454.777.600,00;</i>	<i>99,10</i>
8.1	Pengadaan Mebel	65.494.600,00;	65.494.600,00;	100,00
8.2	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	393.403.000,00;	389.283.000,00;	98,95
9	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>486.436.850,00;</i>	<i>437.123.765,00;</i>	<i>89,86</i>
9.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.400.000,00;	8.400.000,00;	100,00
9.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	223.817.050,00;	188.689.506,00;	84,31
9.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	44.220.000,00;	44.220.000,00;	100,00
9.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	209.999.800,00;	195.814.259,00;	93,24
10	<i>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<i>744.292.600,00;</i>	<i>719.809.985,00;</i>	<i>96,71</i>
10.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	607.555.600,00;	583.327.985,00;	96,01

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
	Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan			
10.2	Pemeliharaan Mebel	5.600.000,00;	5.600.000,00;	100,00
10.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.205.000,00;	80.950.500,00;	99,69
10.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.932.000,00;	49.931.500,00;	100,00

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Perbandingan Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Tujuan Dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
					Anggaran	Realisasi	% Capaian	
		TARGET	Realisasi	% Capaian	(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan, dan Pengelolaan APBD	WTP	WTP	100,00	43.303.475,00;	37.471.900,00;	86,53	0,13
2	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah	5,00	6,70	134,00	1.846.400.800,00;	1.753.030.207,00;	94,94	0,39
3	Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggara	100,00	84,69	84,69	17.587.880.355,00;	14.704.802.556,00;	83,61	0,01

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
					Anggaran	Realisasi	% Capaian	
		TARGET	Realisasi	% Capaian	(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	raan Pemerintahan di Daerah							

Uraian penjelasan tabel:

Sasaran 1 :

Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan dan Pengelolaan APBD;

Adapun Tujuan/ Sasaran **Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan dan Pengelolaan APBD** dengan **Indikator Kinerja Opini BPK (Opini)** yaitu persentase capaiannya sebesar **100,00%**, dengan rincian opini BPK yang ditargetkan tahun 2023 sebesar WTP dengan realisasi adalah sebesar WTP.

Adapun Rincian Anggaran sebesar Rp. 43.303.475,00; dengan Realisasi sebesar Rp. 37.471.900,00; atau persentase capaian sebesar **86,53%** dan capaian Tingkat Efisiensinya sebesar **0,13**, maka dapat disimpulkan capaian Tingkat Efisiensinya termasuk **Tidak Efisien** sebab capaiannya kurang dari 1 (satu).

Sasaran 2 :

Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah;

Adapun Tujuan/ Sasaran **Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah** dengan **Indikator Kinerja Pertumbuhan Pendapatan Daerah (Persen)** yaitu persentase capaiannya sebesar **134,00%**, dengan rincian pertumbuhan pendapatan daerah yang ditargetkan tahun 2023 sebesar 5,00% dengan realisasi adalah sebesar 6,70%.

Adapun Rincian Anggaran sebesar Rp. 1.846.400.800,00; dengan Realisasi sebesar Rp. 1.753.030.207,00; atau persentasae capaian sebesar **94,94%** dan capaian Tingkat Efisiensinya sebesar **0,39**, maka dapat disimpulkan capaian Tingkat Efisiensinya termasuk **Tidak Efisien** sebab capaiannya kurang dari 1 (satu).

Sasaran 3 :

Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;

Adapun Tujuan/ Sasaran **Meningkatnya Koordinasi, Akutabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** dengan **Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Pendukung Urusan Pemerintahan (Persen)** yaitu persentase capaiannya sebesar **84,69%**, dengan rincian pagu belanja pada tahun 2023 sebesar Rp. 19.477.584.630,00; dengan realisasi sebesar Rp. 16.495.304.663,00.

Adapun Rincian Anggaran sebesar Rp. 17.587.880.355,00; dengan Realisasi sebesar Rp. 14.704.802.556,00; atau persentasae capaian sebesar **83,61%** dan capaian Tingkat Efisiensinya sebesar **0,01**, maka

dapat disimpulkan capaian Tingkat Efisiensinya termasuk **Tidak Efisien** sebab capaiannya kurang dari 1 (satu).

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Program Dan Kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00	100,00	100,00	43.303.475,00;	37.471.900,00;	86,53	0,13
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				43.303.475,00 ;	37.471.900,00 ;	86,53	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				43.303.475,00;	37.471.900,00;	86,53	
II	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	85,00	81,62	96,02	1.846.400.800,00;	1.753.030.207,00;	94,94	0,39
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				1.846.400.800,00;	1.753.030.207,00;	94,94	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				32.499.925,00;	31.943.169,00;	98,29	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				559.999.900,00;	522.812.250,00;	93,36	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				93.499.900,00;	93.280.150,00;	99,76	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				36.315.525,00;	35.812.650,00;	98,62	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				60.000.000,00;	59.615.700,00;	99,36	
	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				14.999.800,00;	4.764.430,00;	31,76	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan				157.738.400,00;	144.028.000,00;	91,31	

N o	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingk at Efisie nsi
		Targ et	Realis asi	%Capa ian	Anggaran	Realisasi	%Capa ian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)							
	Penetapan Wajib Pajak Daerah				134.992.650,00;	133.025.250,00;	98,54	
	Pelayanan dan Konsultasi pajak Daerah				64.832.875,00;	64.545.975,00;	99,56	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				59.999.825,00;	57.643.825,00;	96,07	
	Penagihan Pajak Daerah				490.004.825,00;	470.708.133,00;	96,06	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				51.465.950,00;	50.987.350,00;	99,07	
	Pengendalian, pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				49.931.125,00;	49.051.125,00;	98,24	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				40.120.100,00;	34.812.200,00;	86,77	
II I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00	100,00	100,00	17.587.880.355,00;	14.704.802.556,00;	83,61	0,01
	<i>Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				<i>45.000.025,00 ;</i>	<i>44.466.025,00 ;</i>	<i>98,81</i>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.075,00;	19.892.675,00;	99,46	
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24.999.950,00;	24.573.350,00;	98,29	
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				<i>13.404.725.280,00;</i>	<i>10.636.984.644,00;</i>	<i>79,35</i>	
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN				13.369.725.605,00;	10.602.034.969,00;	79,30	
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				19.999.825,00;	19.974825,00 ;	99,87	
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				14.999.850,00;	14.974.850,00;	99,83	
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah Dan Perangkat Daerah</i>				<i>25.249.800,00 ;</i>	<i>25.249.800,00 ;</i>	<i>100,00</i>	
	Rekonsiliasi Dan Laporan				25.249.800,00;	25.249.800,00;	100,00	

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyusunan Barang Milik Daerah Pada SKPD							
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				219.199.850,00;	200.729.850,00;	91,57	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				43.200.000,00;	31.950.000,00;	73,96	
	Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				175.999.850,00;	168.779.850,00;	95,90	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.204.078.350,00;	2.185.660.887,00;	99,16	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				24.993.750,00;	24.993.750,00;	100,00	
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				507.999.775,00;	507.999.775,00;	100,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				29.999.325,00;	29.869.325,00;	99,57	
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan				871.910.000,00;	871.684.125,00;	99,97	
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan				11.016.000,00;	10.980.000,00;	99,67	
	Penyediaan Bahan/ Material				9.820.000,00;	9.820.000,00;	100,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD				118.000.000,00;	117.974.412,00;	99,98	
	Dukungan Pelaksanaan Ssstem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD				630.339.500,00;	612.339.500,00;	97,14	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				458.897.600,00;	454.777.600,00;	99,10	
	Pengadaan Mebel				65.494.600,00;	65.494.600,00;	100,00	
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnva				393.403.000,00;	389.283.000,00;	98,95	

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				486.436.850,00;	437.123.765,00;	89,86	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.400.000,00;	8.400.000,00;	100,00	
	Penyedeiaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik				223.817.050,00;	188.689.506,00;	84,31	
	Pemyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				44.220.000,00;	44.220.000,00;	100,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				209.999.800,00;	195.814.259,00;	93,24	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				744.292.600,00;	719.809.985,00;	96,71	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinnas Jabatan				607.555.600,00;	583.327.985,00;	96,01	
	Pemeliharaan Mebel				5.600.000,00;	5.600.000,00;	100,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				81.205.000,00;	80.950.500,00;	99,69	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				49.932.000,00;	49.931.500,00;	100,00	

Uraian penjelasan tabel :

Program 1 :

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun target program pengelolaan keuangan daerah sebesar 100,00% dengan realisasi capaian sebesar 100,00 dan persentase capaian sebesar 100,00%.

Rincian Anggaran sebesar Rp. 43.303.475,00; dengan Realisasi sebesar Rp. 37.471.900,00; atau persentasae capaian sebesar **86,53%** dan capaian Tingkat Efisiensinya sebesar **0,13**, maka dapat disimpulkan capaian Tingkat Efisiensinya termasuk **Tidak Efisien** sebab capaiannya kurang dari 1 (satu).

Program 2 :

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Adapun target program pengelolaan pendapatan daerah sebesar 85,00% dengan realisasi capaian sebesar 81,62% dan persentase capaian sebesar 96,02%.

Rincian Anggaran sebesar Rp. 1.846.400.800,00; dengan Realisasi sebesar Rp. 1.753.030.207,00; atau persentasae capaian sebesar **94,94%** dan capaian Tingkat Efisiensinya sebesar **0,39**, maka dapat disimpulkan capaian Tingkat Efisiensinya termasuk **Tidak Efisien** sebab capaiannya kurang dari 1 (satu).

Program 3 :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Adapun target program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota sebesar 100,00% dengan realisasi capaian sebesar 100,00% dan persentase capaian sebesar 100,00%.

Rincian Anggaran sebesar Rp. 17.587.880.355,00; dengan Realisasi sebesar Rp. 14.704.802.556,00; atau persentase capaian sebesar **83,61%** dan capaian Tingkat Efisiensinya sebesar **0,01**, maka dapat disimpulkan capaian Tingkat Efisiensinya termasuk **Tidak Efisien** sebab capaiannya kurang dari 1 (satu).

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 menetapkan sebanyak 2 tujuan, 4 sasaran dengan 4 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan dan Pengelolaan APBD terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori tercapai);

- Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 134% (kategori tercapai);
- Sasaran Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 84,69 (kategori tidak tercapai);

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 19.477.584.630,00;, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2023 serapan anggaran sebesar 84,69% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 15,31%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Asahan.

Kisaran, Februari 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN**



LAMPIRAN

MATRIKS RENCANA STARTEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik																			
	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah			Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				15.278.459.312,00		15.336.322.142,82		15.413.250.879,44		15.491.361.057,04		15.570.699.932,28		15.651.316.652,11		92.741.409.975,69
		5.02	Keuangan				15.278.459.312,00		15.336.322.142,82		15.413.250.879,44		15.491.361.057,04		15.570.699.932,28		15.651.316.652,11		92.741.409.975,69
		5.02 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	13.776.092.862,00	100%	14.080.385.367,82	100%	14.009.250.879,44	100%	14.062.356.057,04	100%	14.115.628.382,28	100%	14.169.017.652,11	100%	84.212.731.200,69
		5.02 . 01 . 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	4 Dokumen	69.999.950,00	3 Dokumen	44.999.800,00	3 Dokumen	45.000.000,00	3 Dokumen	48.000.000,00	3 Dokumen	50.000.000,00	3 Dokumen	52.000.000,00	19 Dokumen	309.999.750,00
		5.02 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4 Dokumen	34.999.950,00	3 Dokumen	19.999.825,00	3 Dokumen	20.000.000,00	3 Dokumen	21.500.000,00	3 Dokumen	22.000.000,00	3 Dokumen	22.500.000,00	19 Dokumen	140.999.775,00
		5.02 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	--	35.000.000,00	4 Laporan	24.999.975,00	4 Laporan	25.000.000,00	4 Laporan	26.500.000,00	4 Laporan	28.000.000,00	4 Laporan	29.500.000,00	20 Laporan	168.999.975,00
		5.02 . 01 . 2.01 . 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	--	0,00	--	0,00	4 Dokumen	25.000.000,00	4 Dokumen	26.500.000,00	4 Dokumen	28.000.000,00	4 Dokumen	29.500.000,00	16 Dokumen	109.000.000,00
		5.02 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	10.610.342.202,00	100%	10.713.462.267,82	100%	10.531.750.879,44	100%	10.494.356.057,04	100%	10.462.628.382,28	100%	10.451.017.652,11	100%	63.263.557.440,69
		5.02 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/Bulan	80 Orang/Bulan	10.570.260.852,00	80 Orang/Bulan	10.678.462.717,82	80 Orang/Bulan	10.495.750.879,44	80 Orang/Bulan	10.456.856.057,04	80 Orang/Bulan	10.423.628.382,28	80 Orang/Bulan	10.410.517.652,11	560 Orang/Bulan	63.035.476.540,69
		5.02 . 01 . 2.02 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	25.014.600,00	2 Laporan	19.999.800,00	2 Laporan	20.000.000,00	2 Laporan	21.000.000,00	2 Laporan	22.000.000,00	2 Laporan	23.000.000,00	12 Laporan	131.014.400,00
		5.02 . 01 . 2.02 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	15.066.750,00	14 Laporan	14.999.750,00	14 Laporan	16.000.000,00	14 Laporan	16.500.000,00	14 Laporan	17.000.000,00	14 Laporan	17.500.000,00	84 Laporan	97.066.500,00
		5.02 . 01 . 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	100%	100%	19.999.850,00	100%	25.249.750,00	100%	27.000.000,00	100%	28.000.000,00	100%	29.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	159.249.600,00
		5.02 . 01 . 2.03 . 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	19.999.850,00	2 Laporan	25.249.750,00	2 Laporan	27.000.000,00	2 Laporan	28.000.000,00	2 Laporan	29.000.000,00	2 Laporan	30.000.000,00	12 Laporan	159.249.600,00
		5.02 . 01 . 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	--	100%	13.500.000,00	100%	160.999.800,00	100%	200.000.000,00	100%	201.000.000,00	100%	217.000.000,00	100%	218.000.000,00	100%	1.010.499.800,00
		5.02 . 01 . 2.05 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	--	--	0,00	--	0,00	60 Paket	24.000.000,00	60 Paket	25.000.000,00	60 Paket	26.000.000,00	60 Paket	27.000.000,00	240 Paket	102.000.000,00
		5.02 . 01 . 2.05 . 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	--	2 Orang	13.500.000,00	753 Orang	160.999.800,00	753 Orang	176.000.000,00	753 Orang	176.000.000,00	753 Orang	191.000.000,00	753 Orang	191.000.000,00	3.767 Orang	908.499.800,00
		5.02 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.685.105.355,00	100%	1.955.118.350,00	100%	1.968.500.000,00	100%	1.997.000.000,00	100%	2.035.500.000,00	100%	2.069.000.000,00	100%	11.710.223.705,00
		5.02 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.499.680,00	1 Paket	24.993.625,00	1 Paket	26.000.000,00	1 Paket	27.000.000,00	1 Paket	28.000.000,00	1 Paket	29.000.000,00	6 Paket	151.493.305,00

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.02 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	362.342.950,00	1 Paket	492.793.750,00	1 Paket	500.000.000,00	1 Paket	515.000.000,00	1 Paket	530.000.000,00	1 Paket	545.000.000,00	6 Paket	2.945.136.700,00
		5.02 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	29.998.800,00	1 Paket	29.999.500,00	1 Paket	32.500.000,00	1 Paket	35.000.000,00	1 Paket	37.500.000,00	1 Paket	40.000.000,00	6 Paket	204.998.300,00
		5.02 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	750.765.725,00	1 Paket	613.177.375,00	1 Paket	615.000.000,00	1 Paket	620.000.000,00	1 Paket	635.000.000,00	1 Paket	645.000.000,00	6 Paket	3.878.943.100,00
		5.02 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	11.016.000,00	1 Dokumen	9.960.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	6 Dokumen	60.976.000,00
		5.02 . 01 . 2.06 . 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	49.912.500,00	3 Paket	49.912.500,00	3 Paket	50.000.000,00	3 Paket	50.000.000,00	3 Paket	50.000.000,00	3 Paket	50.000.000,00	18 Paket	299.825.000,00
		5.02 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	99.570.000,00	12 Laporan	103.942.000,00	12 Laporan	100.000.000,00	12 Laporan	100.000.000,00	12 Laporan	100.000.000,00	12 Laporan	100.000.000,00	72 Laporan	603.512.000,00
		5.02 . 01 . 2.06 . 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	364.999.700,00	1 Dokumen	630.339.600,00	1 Dokumen	635.000.000,00	1 Dokumen	640.000.000,00	1 Dokumen	645.000.000,00	1 Dokumen	650.000.000,00	6 Dokumen	3.565.339.300,00
		5.02 . 01 . 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	--	--	318.452.855,00	1 Dokumen	217.980.100,00	1 Dokumen	245.500.000,00	1 Dokumen	276.000.000,00	1 Dokumen	281.500.000,00	1 Dokumen	287.000.000,00	5 Dokumen	1.626.432.955,00
		5.02 . 01 . 2.07 . 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	--	--	0,00	--	0,00	1 Unit	25.000.000,00	2 Unit	50.000.000,00	2 Unit	50.000.000,00	2 Unit	50.000.000,00	7 Unit	175.000.000,00
		5.02 . 01 . 2.07 . 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	--	50 Unit	94.726.875,00	2 Unit	5.000.000,00	2 Unit	5.500.000,00	2 Unit	6.000.000,00	2 Unit	6.500.000,00	2 Unit	7.000.000,00	60 Unit	124.726.875,00
		5.02 . 01 . 2.07 . 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	--	13 Unit	223.725.980,00	10 Unit	212.980.100,00	10 Unit	215.000.000,00	10 Unit	220.000.000,00	10 Unit	225.000.000,00	10 Unit	230.000.000,00	53 Unit	1.326.706.080,00
		5.02 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	458.836.250,00	1 Dokumen	429.015.300,00	1 Dokumen	431.000.000,00	1 Dokumen	442.500.000,00	1 Dokumen	454.000.000,00	1 Dokumen	465.500.000,00	6 Dokumen	2.680.851.550,00
		5.02 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	7.452.000,00	1 Laporan	8.400.000,00	1 Laporan	8.500.000,00	1 Laporan	9.000.000,00	1 Laporan	9.500.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	6 Laporan	52.852.000,00
		5.02 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	217.640.000,00	1 Laporan	219.987.200,00	1 Laporan	220.000.000,00	1 Laporan	225.000.000,00	1 Laporan	230.000.000,00	1 Laporan	235.000.000,00	6 Laporan	1.347.627.200,00
		5.02 . 01 . 2.08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	39.930.000,00	1 Laporan	41.415.000,00	1 Laporan	42.500.000,00	1 Laporan	43.500.000,00	1 Laporan	44.500.000,00	1 Laporan	45.500.000,00	6 Laporan	257.345.000,00
		5.02 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	193.814.250,00	1 Laporan	159.213.100,00	1 Laporan	160.000.000,00	1 Laporan	165.000.000,00	1 Laporan	170.000.000,00	1 Laporan	175.000.000,00	6 Laporan	1.023.027.350,00
		5.02 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	599.856.400,00	1 Dokumen	533.560.000,00	1 Dokumen	560.500.000,00	1 Dokumen	575.500.000,00	1 Dokumen	586.000.000,00	1 Dokumen	596.500.000,00	6 Dokumen	3.451.916.400,00
		5.02 . 01 . 2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	74 Unit	74 Unit	474.566.400,00	74 Unit	403.623.000,00	74 Unit	425.000.000,00	76 Unit	435.000.000,00	78 Unit	440.000.000,00	80 Unit	445.000.000,00	456 Unit	2.623.189.400,00
		5.02 . 01 . 2.09 . 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	--	70 Unit	4.960.000,00	70 Unit	4.960.000,00	70 Unit	5.500.000,00	70 Unit	5.500.000,00	70 Unit	6.000.000,00	70 Unit	6.500.000,00	420 Unit	33.420.000,00
		5.02 . 01 . 2.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	60 Unit	69.330.000,00	60 Unit	75.045.000,00	60 Unit	80.000.000,00	60 Unit	85.000.000,00	60 Unit	90.000.000,00	60 Unit	95.000.000,00	360 Unit	494.375.000,00
		5.02 . 01 . 2.09 . 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	51.000.000,00	1 Unit	49.932.000,00	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	50.000.000,00	6 Unit	300.932.000,00

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah																			
	Meningkatnya kualitas proses analisis, penyusunan, dan pengelolaan APBD			Opini BPK		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
		5.02 . 02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat terbit penyusunan anggaran daerah		100%	39.999.725,00	100%	43.303.475,00	100%	45.000.000,00	100%	48.000.000,00	100%	51.000.000,00	100%	54.000.000,00	100%	281.303.200,00
		5.02 . 02 . 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	39.999.725,00	1 Dokumen	43.303.475,00	1 Dokumen	45.000.000,00	1 Dokumen	48.000.000,00	1 Dokumen	51.000.000,00	1 Dokumen	54.000.000,00	6 Dokumen	281.303.200,00
		5.02 . 02 . 2.01 . 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	2 Dokumen	39.999.725,00	2 Dokumen	43.303.475,00	2 Dokumen	45.000.000,00	2 Dokumen	48.000.000,00	2 Dokumen	51.000.000,00	2 Dokumen	54.000.000,00	12 Dokumen	281.303.200,00
	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah			Pertumbuhan pendapatan daerah		5%		5%		5%		5%		5%		5%		5%	
		5.02 . 04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat ketercapaian target pajak daerah dan retribusi daerah	58,11%	80%	1.462.366.725,00	80%	1.212.633.300,00	85%	1.359.000.000,00	90%	1.381.005.000,00	95%	1.404.071.550,00	100%	1.428.299.000,00	100%	8.247.375.575,00
		5.02 . 04 . 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.462.366.725,00	1 Dokumen	1.212.633.300,00	1 Dokumen	1.359.000.000,00	1 Dokumen	1.381.005.000,00	1 Dokumen	1.404.071.550,00	1 Dokumen	1.428.299.000,00	6 Dokumen	8.247.375.575,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	--	2 Dokumen	30.114.250,00	2 Dokumen	32.499.925,00	2 Dokumen	35.000.000,00	2 Dokumen	35.350.000,00	2 Dokumen	35.703.500,00	2 Dokumen	36.061.000,00	12 Dokumen	204.728.675,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	2 Dokumen	41.092.275,00	2 Dokumen	49.401.075,00	2 Dokumen	53.000.000,00	2 Dokumen	53.530.000,00	2 Dokumen	54.065.300,00	2 Dokumen	54.606.000,00	12 Dokumen	305.694.650,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	72.229.950,00	1 Laporan	84.999.875,00	1 Laporan	93.500.000,00	1 Laporan	102.850.000,00	1 Laporan	113.135.000,00	1 Laporan	124.448.500,00	6 Laporan	591.163.325,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	1 Unit	36.440.700,00	1 Unit	36.315.525,00	1 Unit	37.500.000,00	1 Unit	37.875.000,00	1 Unit	38.253.750,00	1 Unit	38.637.000,00	6 Unit	225.021.975,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	61.251.850,00	1 Laporan	60.000.000,00	1 Laporan	65.000.000,00	1 Laporan	65.650.000,00	1 Laporan	66.306.500,00	1 Laporan	66.970.000,00	6 Laporan	385.178.350,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	--	1 Laporan	176.929.500,00	--	0,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	101.000.000,00	1 Laporan	102.010.000,00	1 Laporan	103.031.000,00	5 Laporan	582.970.500,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	217.436 Obyek Pajak	227.000 Obyek Pajak	167.064.000,00	227.000 Obyek Pajak	164.993.500,00	228.000 Obyek Pajak	165.000.000,00	229.000 Obyek Pajak	166.650.000,00	230.000 Obyek Pajak	168.316.500,00	231.000 Obyek Pajak	170.000.000,00	1.372.000 Obyek Pajak	1.002.024.000,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	217.436 Dokumen;	227.000 Dokumen;	101.336.250,00	227.000 Dokumen;	110.582.000,00	228.000 Dokumen;	115.000.000,00	229.000 Dokumen;	116.150.000,00	230.000 Dokumen;	117.311.500,00	231.000 Dokumen;	118.484.700,00	231.000 Dokumen	678.864.450,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	249 Layanan	600 Layanan	52.452.925,00	600 Layanan	60.332.075,00	650 Layanan	65.000.000,00	650 Layanan	65.650.000,00	700 Layanan	66.306.500,00	700 Layanan	66.969.600,00	3.900 Layanan	376.711.100,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4.625 Dokumen	3.250 Dokumen	50.910.775,00	3.250 Dokumen	50.000.175,00	3.500 Dokumen	55.000.000,00	3.500 Dokumen	55.550.000,00	3.750 Dokumen	56.105.500,00	3.750 Dokumen	56.667.000,00	21.000 Dokumen	324.233.450,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	533.451.625,00	1 Dokumen	430.999.200,00	1 Dokumen	435.000.000,00	1 Dokumen	439.350.000,00	1 Dokumen	443.743.500,00	1 Dokumen	448.181.000,00	6 Dokumen	2.730.725.325,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	87 Dokumen	200 Dokumen	46.427.075,00	200 Dokumen	46.494.425,00	175 Dokumen	50.000.000,00	150 Dokumen	50.500.000,00	125 Dokumen	51.005.000,00	100 Dokumen	51.516.000,00	900 Dokumen	295.942.500,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	--	3.250 Dokumen	57.049.950,00	3.250 Dokumen	50.000.200,00	3.250 Dokumen	52.500.000,00	3.500 Dokumen	53.025.000,00	3.750 Dokumen	53.555.250,00	3.750 Dokumen	54.090.900,00	21.000 Dokumen	320.221.300,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	35.615.600,00	1 Laporan	36.015.325,00	1 Laporan	37.500.000,00	1 Laporan	37.875.000,00	1 Laporan	38.253.750,00	1 Laporan	38.636.300,00	6 Laporan	223.895.975,00
		5.02 . 04 . 2.01 . 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	--	--	0,00	--	0,00	1 Laporan	37.500.000,00	1 Laporan	37.875.000,00	1 Laporan	38.253.750,00	1 Laporan	38.636.300,00	4 Laporan	152.265.050,00

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

KISARAN, JUNI 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN ASAHAN



Drs. SORIMUDA SIREGAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650513 199402 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. SORIMUDA SIREGAR**
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SURYA, B.Sc**
Jabatan : Bupati Asahan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kisaran, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan dan Pengelolaan APBD	1. Opini BPK (Opini)	WTP
2	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah	1. Pertumbuhan pendapatan daerah (persen)	5
3	Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah	1. Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan (persen)	100
4	Meningkatnya Jumlah Pajak Daerah	1. Jumlah pajak daerah yang ditargetkan (rupiah)	93.816.711.376,00

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 16.723.866.260,00	APBD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 43.303.475,00	APBD
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.666.396.100,00	APBD
Jumlah		Rp. 18.433.565.835,00	

Kisaran, 10 Januari 2023

BUPATI ASAHAN

H. SURYA, B.Sc

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN

Drs. SORIMUDA SIREGAR
REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650513 199402 1 001

INDIKATOR KINERJA UATAMA (IKU) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAH TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan dan Pengelolaan APBD	Opini BPK (Opini)	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti}}{\text{Total Temuan BPK dan Inspektorat}} \times 100\%$	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan pendapatan daerah (persen)	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun (n)} - \text{Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
3	Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah	Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan (persen)	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pagu Anggaran}}{\text{Total Pagu Anggaran}} \times 100\%$	Bidang Sekretariat	Bidang Sekretariat

Kisaran, 10 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAH


Drs. SORIMUDA SREGAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650513 199402 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. SORIMUDA SIREGAR**
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SURYA, B.Sc**
Jabatan : Bupati Asahan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kisaran, 01 Nopember 2023

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN



Drs. SORIMUDA SIREGAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19650513 199402 1 001

Pihak Kedua,

BUPATI ASAHAN



H. SURYA, B.Sc

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan dan Pengelolaan APBD	1. Opini BPK (Opini)	WTP
2	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah	1. Pertumbuhan pendapatan daerah (persen)	5
3	Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah	1. Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan (persen)	100
4	Meningkatnya Jumlah Pajak Daerah	1. Jumlah pajak daerah yang ditargetkan (rupiah)	93.816.711.376,00

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 17.587.880.355,00	P.APBD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 43.303.475,00	P.APBD
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.846.400.800,00	P.APBD
Jumlah		Rp. 19.477.584.630,00	

Kisaran, 01 Nopember 2023


BUPATIN ASAHAN
H. SURYA, B.Sc


KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN
Drs. SORIMUDA SIREGAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650513 199402 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan dan Pengelolaan APBD	Opini BPK (Opini)	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti}}{\text{Total Temuan BPK dan Inspektorat}} \times 100\%$	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan pendapatan daerah (persen)	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun (n)} - \text{Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
3	Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah	Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan (persen)	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pagu Anggaran}}{\text{Total Pagu Anggaran}} \times 100\%$	Bidang Sekretariat	Bidang Sekretariat

Kisaran, 01 Nopember 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN

[Signature]

BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650513 199402 1 001